

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdullah, Rozali. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Meriam. 1996. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, Zairin. 2007. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Indroharto, 1993. *“Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kupita, Weda. 2010. *Materi Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Marbun, SF. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Neno, Victor Vayed. 2006. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UU PTUN 2004*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, Victor dan Soedibyo. 1987. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo.2014. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia I*. Jakarta: Kencana.

Utrecht, F. 1986.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Penerbit Tinta Mas.

Wijoyo,Suparto. 2005. *Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Surabaya. Airlangga University Press.

Wiyono,R. 2013.*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,Jakarta:Edisi Ketiga, Sinar Grafika.

Yanto ,Nur F.2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara(Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara) Edisi Revisi*, jakarta.

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

-----, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35)

-----, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

-----,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

-----, Peraturan MeteridalamNegeriNomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihanKepalaDesa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

-----, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 9)

-----, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1)

-----, Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2007.(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 3)

Putusan pengadilan

Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No:42/G/2013/PTUN.SMG

Internet

Nurhidayati Meila, <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-danimplementasinya-di-indonesia>, diakses pada: Sabtu, 03 September 2016 ,pkl : 10:40 WIB

Anonim, <https://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia;loesia/>, diakses pada : sabtu 03/09/16 pkl 10:56

Anonim,<http://desanaurang.blogspot.co.id/2016/08/pengertian-pilkades-pemilihan-kepala.html> diakses pada: minggu 04/09/2016 pkl 8:51

Anonim, <http://bandakatik.blogspot.co.id/2012/02/teori-pembuktian-dalam-ptun.html> diakses pada sabtu 12/11/2016 pkl 19.39

Anonim, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 3/8/2017 pkl 19.30

Skripsi

Galih Bagus Panggangkitpenerapan *dismissal procedure* dalam pengadilan tata usaha negara semarang (studi komparasi putusan nomor: 021/g/2015/ptun-smg dengan penetapan *dismissal procedure* nomor: 36/g/2014/ptun-smg).